Lampiran 5
Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Ciamis	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	2019-2024	
Urusan Pemerintahan	:	Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran	
OPD yang Dinilai	:	Satuan Polisi Pamong Praja	
Sumber Data		Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	
MISI 5			
Tujuan Strategis		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	
Sasaran Strategis		Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	
IKU Renstra OPD		**IKU/PK**	**2024**
	1	Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban	0.5%
Program	1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	**Tujuan Strategis :**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**	
	Sasaran Strategis	**Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum**	
	IKU / PK Renstra OPD:		
	1	Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	96%
	Program :		
	1.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	**Tujuan Strategis :**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**	
	Sasaran Strategis :	**Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum**	
	IKU / PK Renstra OPD:		
	1	Level Maturitas SPIP	3 Level
	2.	Hasil Evaluasi AKIP	A Hasil Penilaian
	3.	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	700 Hasil Penilaian
	4.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Hasil penilaian
	Program :		
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	

Ciamis,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda., IVc
NIP. 19680110 199010 1 001

Lampiran 5
Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : 2019-2024 Urusan Pemerintahan : OPD yang Dinilai : Satuan Polisi Pamong Praja			
Sumber Data	Rencana Kerja OPD		
MISI 5			
Tujuan Strategis	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**		
Sasaran Strategis	**Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum**		
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	
	2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
	4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	5	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
	6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
	7	Sosilaisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	
	8	Penangan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	
	9	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini,pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	12 laporan
	2	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyrakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12 dokumen
	3	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkat kapasitasnya	350 orang
	4	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam teknisk pencegahan kejahatan	12 dokumen
	5	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman	6 dokumen
	6	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani dan jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	12 laporan
	7	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 laporan
	8	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran	12 laporan
	9	kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 laporan
Program Satuan Polisi Pamong Praja (2022)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	

Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Jumalh laporan hasil pelaksanan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah	12 laporan
	2	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan lsosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	530 orang
		Ciamis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda., IVc NIP. 19680110 199010 1 001	

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nama OPD	:	Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	2019-2024
Tujuan Strategis (Misi 5)	:	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Urusan Pemerintahan	:	Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	MISI 5									
	Tujuan Strategis:									
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien									
	Sasaran Strategis:									
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	IKK Penegakan perda	Masih terbatasnya penyampaian Informasi kepada para Pengusaha?masyarakat		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Kurangnya Personil dan terbatasnya anggaran biaya untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengawasan dengan Baik	Man & Money	C	Tidak Optimalnya Pelayanan Pengawasan	Masyarakat dan para Pelaku usaha
			Sarana dan Prasarana yg di butuhkan perlunya Tim Pengawasan dg SKPD terkait		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Kurangnya SDM dalam pemahaman terhadap Pengawasan	Man	C	Tidak Optimalnya Pelayanan Pengawasan	Masyarakat dan para Pelaku usaha
			Adanya Pergantian Peraturan Perundang undangan Perizinan menjadi Online Single Service Risk		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Penerapan dan Pemahaman kurang optimal	Method & Money	C	Terdapat masalah dalamn hal Perizinan trehadap masyarakat	Para Pengusaha dan Masyarakat terkait
			Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana prasarana belum memadai		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Kurang Maksimalnya pelaksanaan terhadap kegiatan	Man & Money	C	Tidak dapat melaksanakan penyelesaian secara maksimal	SKPD terkait
		IKK ketertiban umum	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ketertiban umum		Kasi operasi dan pengendalian	Kurangnya sarana dan prasarana tibumtranmas	Money	C	Tidak tertangganinya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masyarakat
			Kurang optimalnya penangganan PKL		Kasi operasi dan pengendalian	Kurangnya pemahaman PKL terhadap perda yang berlaku	Man & Money	C	Banyaknya PKL yang melanggar perda	Masyarakat & SatpolPP
		IKK sumber daya manusia	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia		Kasubag umum dan kepegawaian	Penangganan pelanggaran perda dan perkada tidak optimal	Man	C	Tidak tertangganinya pelanggaran perda dan perkada	Masyarakat
						Penangganan pelanggaran keteritiban umum dan ketentraman masyarakat tidak optimal	Man	C	Tidak tertangganinya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masyarakat
		IKK perlindungan masyarakat	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kurang		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Tidak ada insentif, resiko kerja tinggi, dan perfoma tidak menarik	Money	C	Tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas	Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		Kabid Linmas, Kasi Satuan Linmas dan Kasi Bina Potensi Masyarakat	Adanya pemahaman masyarakat bahwa trantibum merupakan tugas dan tanggungjawab Polri, TNI, dan Satpol PP dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Man & Money	C	Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Masyarakat
			Tidak adanya peralatan dan perlengkapan linmas		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Keterbatasan anggaran	Money	C	Tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas	Masyarakat
	Sasaran Strategis:									
	Meningkatnya kesiagaan dan pelayanan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran (JUMLAH WMK DI KABUPATEN CIAMIS)	Kurang optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Kurangnya SDM dan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Man & Money	C	Tidak optimalnya penangganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Masyarakat
			Kurang tepatnya rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Kasi pencegahan	Kurang jelasnya persyaratan rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis	Man	C	Kurangnya relawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan	SatpolPP dan Masyarakat
			Dapat terjadinya potensi mengalami kecelakaan kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan		Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Kurangnya pelatihan SDM pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Man & Money	C	Tidak optimalnya penangganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Masyarakat

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Lampiran 5
Form 3.c

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nama OPD	:	Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	2019-2024
Tujuan Strategis (Misi 5)	:	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Sasaran strategis OPD (Misi 5)	:	Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran
Urusan Pemerintahan	:	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
MISI 5											
II	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										
A											
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani;Jumlah ancaman keselamatan masyarakat yang tertangani		Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ketertiban umum		Kasi operasi dan pengendalian	Kurangnya sarana dan prasarana tibumtranmas	Internal & eksternal	C	Tidak tertangganinya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masyarakat
				Kurang optimalnya penangganan PKL		Kasi operasi dan pengendalian	Kurangnya pemahaman PKL terhadap perda yang berlaku	Internal & eksternal	C	Banyaknya PKL yang melanggar perda	Masyarakat & SatpolPP
				Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kurang		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Tidak ada insentif, resiko kerja tinggi, dan perfoma tidak menarik	Internal & eksternal	C	Tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas	Masyarakat
				Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		Kabid Linmas, Kasi Satuan Linmas dan Kasi Bina Potensi Masyarakat	Adanya pemahaman masyarakat bahwa trantibum merupakan tugas dan tanggungjawab Polri, TNI, dan Satpol PP dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Internal & eksternal	C	Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Masyarakat
				Tidak adanya peralatan dan perlengkapan linmas		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Keterbatasan anggaran	Internal & eksternal	C	Tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas	Masyarakat
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah penurunan kasus pelanggaran perda		Masih terbatasnya penyampaian Informasi kepada para Pengusaha?masyarakat		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Kurangnya Personil dan terbatasnya anggaran biaya untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengawasan dengan Baik	Internal & eksternal	C	Tidak Optimalnya Pelayanan Pengawasan	Masyarakat dan para Pelaku usaha
				Sarana dan Prasarana yg di butuhkan perlunya Tim Pengawasan dg SKPD terkait		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Kurangnya SDM dalam pemahaman terhadap Pengawasan	Internal & eksternal	C	Tidak Optimalnya Pelayanan Pengawasan	Masyarakat dan para Pelaku usaha
				Adanya Pergantian Peraturan Perundang undangan Perizinan menjadi Online Single Service Risk		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Penerapan dan Pemahaman kurang optimal	Internal & eksternal	C	Terdapat masalah dalamn hal Perizinan trehadap masyarakat	Para Pengusaha dan Masyarakat terkait

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana prasarana belum memadai		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Kurang Maksimalnya pelaksanaan terhadap kegiatan	Internal & eksternal	C	Tidak dapat melaksanakan penyelesaian secara maksimal	SKPD terkait
III	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**										
A											
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan damkar		Kurang optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Kurangnya SDM dan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Internal	C	Tidak optimalnya penangganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Masyarakat
				Dapat terjadinya potensi mengalami kecelakaan kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan		Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Kurangnya pelatihan SDM pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Internal	C	Tidak optimalnya penangganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Masyarakat
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan yang terlatih		Kurang tepatnya rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Kasi pencegahan	Kurang jelasnya persyaratan rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis	Internal & eksternal	C	Kurangnya relawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan	SatpolPP dan Masyarakat

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategor
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu m
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dam
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	**: Pemerintah Kabupaten Ciamis**
Tahun Penilaian	**: 2024**
Tujuan Strategis (Misi 5)	**: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**
Urusan Pemerintahan	**: Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	**Risiko Strategis**				
1	-				
2	-				
II	**Risiko Strategis OPD 1: Satuan Polisi Pamong Praja**				
	MISI 5				
1	Masih terbatasnya penyampaian Informasi kepada para Pengusaha?masyarakat	RSO.	3	3	9
2	Sarana dan Prasarana yg di butuhkan perlunya Tim Pengawasan dg SKPD terkait	RSO.	3	3	9
3	Adanya Pergantian Peraturan Perundang undangan Perizinan menjadi Online Single Service Risk	RSO.	3	3	9
4	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana prasarana belum memadai	RSO.	3	3	9
5	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ketertiban umum	RSO.	3	3	9
6	Kurang optimalnya penangganan PKL	RSO.	3	4	12
7	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kurang	RSO.	5	3	15
8	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	RSO.	5	3	15
9	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan linmas	RSO.	5	5	25
10	Kurang optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis	RSO.	5	3	15
11	Kurang tepatnya rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis	RSO.	5	3	15
12	Dapat terjadinya potensi mengalami kecelakaan kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan	RSO.	5	5	25

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
Tahun Penilaian : **2024**
Tujuan Strategis (Misi 5) : **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**
Urusan Pemerintahan : **Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis**					
1	-					
2	-					
II	**Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**					
	MISI 5					
1	Masih terbatasnya penyampaian Informasi kepada para Pengusaha?masyarakat		9	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan	Kurangnya Personil dan terbatasnya anggaran biaya untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengawasan dengan	Tidak Optimalnya Pelayanan Pengawasan
2	Sarana dan Prasarana yg di butuhkan perlunya Tim Pengawasan dg SKPD terkait		9	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan	Kurangnya SDM dalam pemahaman terhadap Pengawasan	Tidak Optimalnya Pelayanan Pengawasan
3	Adanya Pergantian Peraturan Perundang undangan Perizinan menjadi Online Single Service Risk		9	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan	Penerapan dan Pemahaman kurang optimal	Terdapat masalah dalamn hal Perizinan trehadap masyarakat
4	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana prasarana belum memadai		9	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan	Kurang Maksimalnya pelaksanaan terhadap kegiatan	Tidak dapat melaksanakan penyelesaian secara maksimal
5	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ketertiban umum		9	Kasi operasi dan pengendalian	Kurangnya sarana dan prasarana tibumtranmas	Tidak tertangganinya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6	Kurang optimalnya penangganan PKL		12	Kasi operasi dan pengendalian	Kurangnya pemahaman PKL terhadap perda yang berlaku	Banyaknya PKL yang melanggar perda
7	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kurang		15	Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Tidak ada insentif, resiko kerja tinggi, dan perfoma tidak menarik	Tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas
8	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		15	Kabid Linmas, Kasi Satuan Linmas dan Kasi Bina Potensi Masyarakat	Adanya pemahaman masyarakat bahwa trantibum merupakan tugas dan tanggungjawab Polri, TNI, dan Satpol PP dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Kurangnya Kesadaran dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
9	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan linmas		25	Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Keterbatasan anggaran	Tidak optimalnya dalam pelaksanaan tugas
10	Kurang optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		15	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Kurangnya SDM dan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Tidak optimalnya penangganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
11	Dapat terjadinya potensi mengalami kecelakaan kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan		25	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Kurangnya pelatihan SDM pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Tidak optimalnya penangganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
12	Kurang tepatnya rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		15	Kasi pencegahan	Kurang jelasnya persyaratan rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis	Kurangnya relawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
Tahun Penilaian : **'2024**

Tujuan Strategis (Misi 5) : **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**

Urusan Pemerintahan : **Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1	-						
II	**Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**						
	MISI 5						
1	Masih terbatasnya penyampaian Informasi kepada para Pengusaha?masyarakat		Dengan melakukan pelaksanaan Pengawasan	Meningkatkan SDM dan Penambahan Personil	Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari
2	Sarana dan Prasarana yg di butuhkan perlunya Tim Pengawasan dg SKPD terkait		Melaksanakan Pengawasan	Dengan melakukan Tim Teknis Pengawasan	Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari
3	Adanya Pergantian Peraturan Perundang undangan Perizinan menjadi Online Single Service Risk		Melakukan Penanganan dan Penyelesaian masalah	Dengan penambahan Personil dan peningkatan SDM	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari
4	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana prasarana belum memadai		Dengan Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan	Meningkatkan Keahlian SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari
5	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ketertiban umum		Mengajukan anggaran perawatan dan perlengkapan tibumtranams	Pemenuhan sarana dan prasarana agar memadai	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	Kasi operasi dan pengendalian	1 Tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Kurang optimalnya penangganan PKL		Melakukan pendataan	Melakukan sosialisasi tentang perda K3 kepada pelaku usaha	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha	Kasi operasi dan pengendalian	1 Tahun
7	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kurang		Melakukan Pelatihan Linmas	Pemenuhan sarana, prasarana yang memadai serta insentif bagi anggota linmas	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	1 Tahun
8	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		Melakukan Pelatihan Linmas dan Pembinaan Potensi Masyarakat	Pemenuhan pemahaman dalam menjaga keamanan lingkungan	Melakukan pembinaan dan pemahaman kembali kepada anggota linmas dan masyarakat	Kabid Linmas, Kasi Satuan Linmas dan Kasi Bina Potensi Masyarakat	1 Tahun
9	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan linmas		Mengajukan anggaran perawatan dan perlengkapan linmas	Pemenuhan sarana dan prasarana agar memadai	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	1 Tahun
10	Kurang optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	3 Bulan
11	Dapat terjadinya potensi mengalami kecelakaan kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan		Mengikuti program Pemerintah Pusat yang telah dijadwalkan	Meningkatkan keahlian SDM	Melakukan pelatihan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	1 Tahun
12	Kurang tepatnya rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis			Kerjasama antar pihak agar lebih jelas terkait rekrutmen	Melakukan bimtek dan sosialisasi terhadap calon relawan	Kasi pencegahan	1 Tahun

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Lampiran 5
Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis (Misi 5) : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Urusan Pemerintahan : Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong						
	MISI 5						
1	Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Masyarakat	14 hari	14 hari	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
2	Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Masyarakat	14 hari	14 hari	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
3	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Masyarakat	14 hari	14 hari	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
4	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	Masyarakat	14 hari	14 hari	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
5	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait		Kasi operasi dan pengendalian	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
6	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha		Kasi operasi dan pengendalian	Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
7	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
8	Melakukan pembinaan dan pemahaman kembali kepada anggota linmas dan masyarakat		Kabid Linmas, Kasi Satuan Linmas dan Kasi Bina Potensi Masyarakat	Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
9	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
10	Melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana	Melakukan komunikasi dengan pihak SKPD terkait	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	SKPD	3 Bulan	3 Bulan	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
11	Melakukan pelatihan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan	Melaksanakan pelatihan pada SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan
12	Melakukan bimtek dan sosialisasi terhadap calon relawan	Pelaksanaan sosialisasi dan rapat korrdinasi	Kasi pencegahan	SatpolPP dan Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	dilaksanakan dalam jangka waktu rencana pelaksanaan

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

Lampiran 5
Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
Tahun Penilaian : **2024**
Tujuan Strategis (Misi 5) : **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**
Urusan Pemerintahan : **Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja					
	MISI 5					
1	Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari	14 hari	
2	Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari	14 hari	
3	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari	14 hari	
4	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha		Kepala Bidang Penegakan Perundang Undanagn dan Kasi Pengawasan	14 hari	14 hari	
5	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait		Kasi operasi dan pengendalian	1 Tahun	1 Tahun	
6	Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha		Kasi operasi dan pengendalian	1 Tahun	1 Tahun	
7	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	1 Tahun	1 Tahun	Pelaksanaan rekon pada SKPD terkait
8	Melakukan pembinaan dan pemahaman kembali kepada anggota linmas dan masyarakat		Kabid Linmas, Kasi Satuan Linmas dan Kasi Bina Potensi Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	Pelaksanaan rekon pada SKPD terkait

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
9	Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait		Kabid Linmas dan Kasi Satuan Linmas	1 Tahun	1 Tahun	Pelaksanaan rekon pada SKPD terkait
10	Melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	3 Bulan	3 Bulan	Pelaksanaan rekon pada SKPD terkait
11	Melakukan pelatihan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan	Melakukan evaluasi	Kabid DAMKAR dan Ka. UPT DAMKAR	1 Tahun	1 Tahun	Pelaksanaan akan di dokumentasikan dan di evaluasi
12	Melakukan bimtek dan sosialisasi terhadap calon relawan	Melakukan sosialisai	Kasi pencegahan	1 Tahun	1 Tahun	Pelaksanaan akan di dokumentasikan dan di evaluasi

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

Lampiran 5
Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

a Pemda : Pemerintah Kabupaten Ciamis
Penilaian : 2024
rategis (Misi 5) : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Pemerintahan : Ketentraman dan Ketertiban Umun serta Perlindungan Masyarakat, dan sub urusan Kebakaran

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru: ……									
II	**Risiko Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**									
	MISI ...									
1	Masih terbatasnya penyampaian Informasi kepada para Pengusaha?masyarakat		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat	14 hari	14 hari	
2	Sarana dan Prasarana yg di butuhkan perlunya Tim Pengawasan dg SKPD terkait		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan Koordinasi dan Pengawasan dengan SKPD terkait dan para Pengusaha/masyarakat	14 hari	14 hari	
3	Adanya Pergantian Peraturan Perundang undangan Perizinan menjadi Online Single Service Risk		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha	14 hari	14 hari	
4	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sarana prasarana belum memadai		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha	14 hari	14 hari	
5	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan ketertiban umum		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	1 Tahun	1 Tahun	
6	Kurang optimalnya penangganan PKL		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan Koordinasi dengan SKPD dan Pelaku usaha	1 Tahun	1 Tahun	
7	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas sangat kurang		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	1 Tahun	1 Tahun	
8	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan pembinaan dan pemahaman kembali kepada anggota linmas dan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	
9	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan linmas		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	1 Tahun	1 Tahun	
10	Kurang optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait	3 Bulan	3 Bulan	

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
11	Dapat terjadinya potensi mengalami kecelakaan kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan pelatihan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan	1 Tahun	1 Tahun	
12	Kurang tepatnya rekrutmen relawan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Ciamis		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan bimtek dan sosialisasi terhadap calon relawan	1 Tahun	1 Tahun	
	Masalah/Risiko Baru: ……									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan